

ABSTRAK

SATPOL PP adalah aparat daerah yang salah satu tugasnya menegakkan Peraturan Daerah. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan kewenangan SATPOL PP Kabupaten Cilacap didalam menjalankan tugasnya menegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu Bagaimana wewenang SATPOL PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima, dan apakah kendala-kendala SATPOL PP didalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai wewenang SATPOL PP dalam menegakan peraturan daerah di Kabupaten Cilacap. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima antara lain melakukan penertiban non-yustisial, melakukan penindakan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban umum serta memberikan sanksi administratif. Selain wewenang tersebut, kendala-kendala satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 5 Tahun 2004 yaitu mengenai kualitas sumber daya personil dan luasnya wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.

Kata Kunci: Wewenang Satpol PP, Penegakan Perda, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

SATPOL PP is a regional apparatus whose to enforce regional regulations. This research was conducted to explain the authority of the Cilacap Regency SATPOL PP in carrying out its duties to enforce regional regulation number 5 of 2004 concerning street vendors. The formulation of the problem in this research is how the authority of SATPOL PP in enforcing regional regulation number 5 of 2004 concerning Street Vendors, and what are the constraints of SATPOL PP in enforcing Regional Regulation number 5 of 2004 concerning street vendors in Cilacap Regency. This study to provide information about the authority of the SATPOL PP in enforcing regional regulations in Cilacap Regency. The method in this research is research on legal systematics. The author uses a type of normative juridical law research. The conclusion in this study is the authority of the civil service police unit in enforcement of regional regulation Number 5 of 2004 concerning street vendors, among others, carrying out non-judicial controls, taking action against street vendors who violate public order and providing administrative sanctions. Apart from this authority, the civil service police unit's obstacles in enforcing regional regulation number 5 of 2004 are regarding the quality of personnel resources and the size of the working area of the Cilacap Regency civil service police unit.

Keywords: Authority of Satpol PP, Enforcement of Regional Regulations, Street Vendors